



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 26789-26799

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Model Kemitraan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis

Abdul Mugis Mugni Amin¹, Rina Madyasari²

^{1,2}Kewirausahaan, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cipasung Tasikmalaya

¹mugisabd@gmail.com, ²rinamadyasari@uncip.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis model kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya, mengidentifikasi tingkat keterlibatan UMKM lokal, mengkaji faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model kemitraan yang dapat memperkuat partisipasi pelaku usaha daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola SPPG Sukamanah dan pelaku UMKM yang menjadi pemasok beras, sayuran, tahu dan tempe, buah-buahan, ayam, serta telur. Informan dipilih secara purposif hingga data mencapai kejenuhan. Analisis dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, kemudian diperkuat menggunakan NVivo 15 melalui proses pengodean, word frequency query, project map, dan framework matrices. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM lokal telah berjalan melalui penyediaan berbagai bahan pangan, namun belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan kapasitas produksi, modal, pemenuhan standar mutu, fluktuasi harga, kondisi cuaca, dan kontinuitas pasokan. Kemitraan yang berlangsung bersifat operasional dan saling menguntungkan, didukung oleh kepastian pasar, komunikasi, permintaan berkelanjutan, serta kedekatan lokasi. Penelitian merekomendasikan model kemitraan kolaboratif yang mengintegrasikan pembagian peran, pengembangan kapasitas pemasok, standarisasi mutu, kepastian mekanisme pembayaran, pengelolaan risiko, dan evaluasi kinerja secara berkala. Model tersebut diharapkan meningkatkan keterlibatan UMKM lokal, menjaga keandalan rantai pasok SPPG, dan memperluas dampak ekonomi Program MBG di daerah.

Kata Kunci: Model Kemitraan, UMKM, Program Makan Bergizi Gratis, Keterlibatan UMKM Lokal, SPPG.

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Keberadaan UMKM tidak hanya berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor strategis menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Tyas et al., 2020).

Salah satu program strategis pemerintah yang memiliki potensi besar dalam mendorong pemberdayaan UMKM adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM lokal untuk berpartisipasi sebagai penyedia bahan pangan dalam rantai pasok program. Kebutuhan bahan pangan yang berlangsung secara rutin menjadikan Program MBG sebagai pasar yang potensial bagi UMKM sehingga mampu memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi lokal apabila dikelola melalui sistem kemitraan yang efektif (Basit & Ramadani, 2025). Selain itu, pemanfaatan potensi pangan lokal dalam Program MBG juga menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan keterlibatan pelaku usaha daerah dalam penyelenggaraan program pemerintah (Ambarwati et al., 2025).

Meskipun demikian, keterlibatan UMKM dalam Program MBG tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya model kemitraan yang mampu menghubungkan kebutuhan program dengan kapasitas UMKM. Kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang dibangun berdasarkan prinsip saling menguntungkan melalui pembagian peran, tanggung jawab, serta dukungan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Model kemitraan yang terstruktur mampu memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing usaha, memperkuat koordinasi antar pelaku usaha, serta menciptakan keberlanjutan hubungan bisnis (Fitri & Wahyudi, 2025). Selain itu, kemitraan juga menjadi strategi dalam meningkatkan kapasitas UMKM sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar secara lebih efektif dan berkelanjutan (Salsabila et al., 2025).

SPPG Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu pelaksana Program Makan Bergizi Gratis yang melibatkan berbagai pemasok bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan program. Besarnya

kebutuhan bahan pangan memberikan peluang yang besar bagi UMKM lokal untuk menjadi bagian dari rantai pasok program. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, keterlibatan UMKM lokal masih belum optimal karena sebagian besar pemasok bahan pangan masih berasal dari luar wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang ekonomi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh UMKM lokal sehingga diperlukan model kemitraan yang mampu meningkatkan partisipasi mereka dalam Program MBG.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji kemitraan UMKM dalam berbagai konteks. Fitri dan Wahyudi (2025) menjelaskan bahwa kemitraan bisnis mampu meningkatkan daya saing UMKM melalui penguatan hubungan kerja sama antarpelaku usaha. Penelitian Salsabila et al. (2025) menunjukkan bahwa keputusan UMKM untuk bermitra memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha. Rahmawati dan Fatticia (2025) juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada kemitraan dalam konteks pengembangan usaha secara umum, sedangkan kajian mengenai model kemitraan UMKM dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis, khususnya pada tingkat SPPG, masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) berupa analisis model kemitraan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis pada tingkat SPPG dengan menitikberatkan pada upaya meningkatkan keterlibatan UMKM lokal. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi bentuk kemitraan yang telah diterapkan, tetapi juga menganalisis pola kerja sama, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model kemitraan yang lebih sesuai untuk memperkuat partisipasi UMKM lokal dalam rantai pasok Program MBG.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kemitraan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis di SPPG Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya serta merumuskan model kemitraan yang mampu meningkatkan keterlibatan UMKM lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai model kemitraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara komprehensif dinamika kemitraan, pola kerja sama, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan program.

Objek penelitian adalah model kemitraan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedangkan subjek penelitian terdiri atas pengelola SPPG Sukamanah dan pelaku UMKM yang terlibat sebagai pemasok bahan pangan program. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai *data saturation*, sehingga diperoleh enam informan utama yang terdiri atas satu pengelola SPPG dan lima pelaku UMKM yang memasok beras, sayuran, tahu dan tempe, buah-buahan, serta ayam dan telur.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk memperkuat proses analisis, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak NVivo 15 melalui tahapan pengkodean (*coding*), *word frequency query*, *analytical map*, dan *framework matrices* guna mengidentifikasi tema, hubungan antarkategori, serta pola kemitraan yang terbentuk. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode sehingga temuan penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang baik.

3. Hasil dan Diskusi

Kondisi Keterlibatan UMKM Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya telah berjalan dengan baik melalui partisipasi beberapa pelaku usaha sebagai pemasok bahan pangan, seperti beras, sayuran, ayam, telur, buah-buahan, serta produk olahan pangan lainnya. Keterlibatan tersebut memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh akses pasar yang lebih stabil karena kebutuhan bahan pangan dalam Program MBG bersifat rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku UMKM, tetapi juga mendukung kelancaran penyediaan bahan pangan bagi pelaksanaan program.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan UMKM lokal belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa kebutuhan bahan pangan yang dipenuhi oleh pemasok dari luar wilayah karena keterbatasan kapasitas produksi, kontinuitas pasokan, dan kemampuan sebagian UMKM dalam

memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh SPPG. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang ekonomi yang dihadirkan Program MBG masih dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas UMKM lokal agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa Program MBG memiliki peran strategis sebagai sarana pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM dalam rantai pasok pangan. Keberadaan permintaan yang berlangsung secara berkesinambungan memberikan kepastian pasar bagi UMKM sehingga dapat mendorong perkembangan usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan Basit dan Ramadani (2025) yang menyatakan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, Ambarwati et al. (2025) menjelaskan bahwa pemanfaatan potensi pangan lokal dalam Program MBG merupakan strategi yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kontribusi UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan UMKM lokal dalam Program MBG telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu SPPG memperoleh pasokan bahan pangan yang lebih mudah dijangkau, sedangkan UMKM memperoleh peluang usaha yang lebih pasti. Namun, peningkatan kapasitas produksi, pemenuhan standar kualitas, serta keberlanjutan pasokan masih menjadi aspek yang perlu diperkuat agar partisipasi UMKM lokal dalam Program MBG dapat semakin optimal.

Gambar 1. Hasil Word Cloud NVivo 15



Berdasarkan hasil *word frequency query* menggunakan NVivo 15, kata-kata yang paling sering muncul dalam proses wawancara meliputi *UMKM*, *SPPG*, *kemitraan*, *program*, *pasokan*, dan *bahan pangan*. Dominasi kata-kata tersebut menunjukkan bahwa fokus pembahasan informan berkaitan dengan keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan serta hubungan kemitraan dengan SPPG. Visualisasi ini memperkuat hasil wawancara bahwa keberlangsungan Program MBG sangat dipengaruhi oleh kemampuan UMKM dalam memenuhi kebutuhan program.

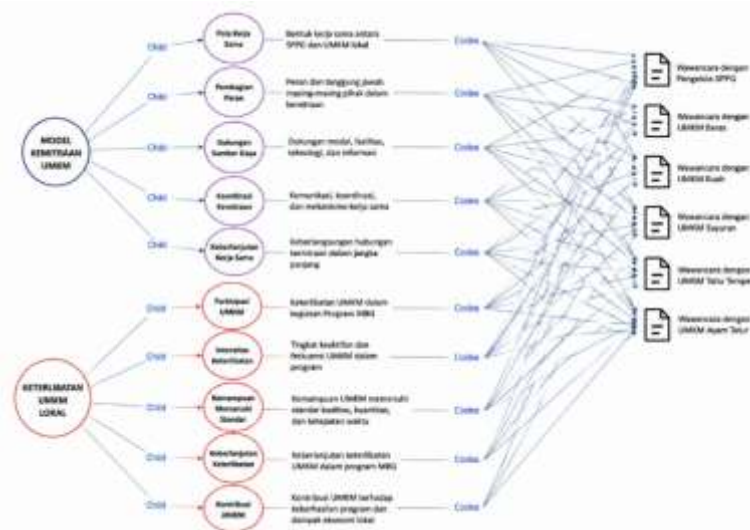
Model Kemitraan yang Diterapkan antara UMKM dan SPPG Sukamanah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kemitraan yang diterapkan antara UMKM dan SPPG Sukamanah merupakan kemitraan operasional yang dibangun atas dasar prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dalam pola ini, SPPG berperan sebagai pihak yang menentukan kebutuhan bahan pangan sesuai standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sedangkan UMKM berperan sebagai pemasok yang bertanggung jawab menyediakan bahan pangan sesuai spesifikasi, jumlah, dan jadwal yang telah disepakati.

Hubungan kemitraan tersebut memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. SPPG memperoleh jaminan ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan program, sementara UMKM memperoleh kepastian pasar yang mampu meningkatkan keberlangsungan usahanya. Kejelasan pembagian peran juga menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kerja sama sehingga setiap pihak memahami hak dan tanggung jawabnya.

Temuan ini sejalan dengan Fitri dan Wahyudi (2025) yang menyatakan bahwa kemitraan bisnis mampu meningkatkan daya saing UMKM melalui hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Selain itu, penelitian Florida Edit et al. (2026) juga menjelaskan bahwa kemitraan strategis mampu memperkuat kemandirian UMKM apabila didukung koordinasi yang baik serta pembagian peran yang jelas.

Gambar 2. Project Map Hubungan Antar Tema Penelitian



Hasil visualisasi *project map* menunjukkan adanya hubungan yang erat antara keterlibatan UMKM, model kemitraan, pola kerja sama, faktor pendukung, faktor penghambat, serta model kemitraan kolaboratif. Hubungan tersebut menggambarkan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek operasional, tetapi juga oleh koordinasi, komunikasi, dan kapasitas UMKM dalam memenuhi kebutuhan Program MBG.

Pola dan Mekanisme Kerja Sama dalam Program MBG

Pola kerja sama antara SPPG Sukamanah dan UMKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyampaian kebutuhan bahan pangan, penetapan standar kualitas, kesepakatan jumlah dan waktu pengiriman, pelaksanaan distribusi, serta evaluasi secara berkala. Komunikasi dilakukan secara intensif agar setiap perubahan kebutuhan dapat segera diinformasikan kepada pemasok sehingga proses distribusi bahan pangan tetap berjalan lancar.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kemitraan tidak hanya bergantung pada kemampuan UMKM dalam menyediakan bahan pangan, tetapi juga dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif antara seluruh pihak yang terlibat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi sarana untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan memastikan bahwa standar Program MBG tetap terpenuhi.

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Rahmawati dan Fatticia (2025) yang menyatakan bahwa kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi, koordinasi, dan komitmen yang berkelanjutan agar tujuan bersama dapat tercapai secara optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kemitraan UMKM dengan Program MBG

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kemitraan, yaitu adanya kepastian pasar, permintaan bahan pangan yang berlangsung secara rutin, komunikasi yang baik antara SPPG dan UMKM, serta kedekatan lokasi yang mempermudah proses distribusi bahan pangan. Faktor-faktor tersebut memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya karena memiliki pasar yang relatif stabil.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi keberlangsungan kemitraan, antara lain keterbatasan kapasitas produksi UMKM, fluktuasi harga bahan baku, kondisi cuaca yang memengaruhi hasil produksi, keterbatasan modal usaha, serta belum terjaminnya kontinuitas pasokan bahan pangan. Kendala tersebut menyebabkan sebagian kebutuhan bahan pangan masih harus dipenuhi dari luar wilayah sehingga peluang keterlibatan UMKM lokal belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Temuan ini sejalan dengan Salsabila et al. (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan kemitraan sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal UMKM, baik dari aspek kapasitas produksi, kemampuan memenuhi standar kualitas, maupun keberlanjutan pasokan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas UMKM menjadi aspek penting dalam memperkuat efektivitas kemitraan.

Model Kemitraan yang Direkomendasikan untuk Meningkatkan Keterlibatan UMKM Lokal

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, model kemitraan yang paling sesuai untuk meningkatkan keterlibatan UMKM lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis adalah model kemitraan kolaboratif. Model ini

menekankan kerja sama yang berkelanjutan melalui pembagian peran yang jelas, komunikasi yang intensif, koordinasi yang efektif, serta komitmen bersama dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pasokan bahan pangan.

Penerapan model kemitraan kolaboratif diharapkan mampu memperluas partisipasi UMKM lokal dalam rantai pasok Program MBG sehingga manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan oleh penyelenggara, tetapi juga oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui pembinaan, peningkatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pendampingan kepada UMKM menjadi faktor penting dalam memperkuat keberlanjutan kemitraan.

Temuan penelitian ini memperkuat konsep kemitraan yang menekankan hubungan saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagai dasar terciptanya kerja sama yang berkelanjutan. Dengan demikian, model kemitraan kolaboratif tidak hanya mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG, tetapi juga berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan keterlibatan UMKM dalam program pemerintah.

Penguatan Rantai Pasok Pangan Lokal melalui Kemitraan

Temuan mengenai kepastian pasar dan permintaan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa Program MBG dapat berfungsi sebagai jangkar permintaan bagi UMKM pangan lokal. Bagi pelaku usaha kecil, permintaan yang teratur mempunyai arti penting karena membantu memperkirakan volume produksi, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan arus kas. Namun, kepastian pasar baru menghasilkan manfaat yang berkelanjutan apabila diikuti kepastian spesifikasi, jadwal pemesanan, dan mekanisme penerimaan barang. Dengan demikian, kemitraan tidak cukup dipahami sebagai hubungan jual beli berulang, tetapi perlu diarahkan menjadi hubungan rantai pasok yang memungkinkan SPPG dan UMKM melakukan perencanaan bersama berdasarkan kebutuhan menu dan kapasitas produksi yang tersedia.

Kedekatan lokasi pemasok dengan SPPG merupakan kekuatan yang ditemukan dalam penelitian ini. Rantai pasok yang lebih pendek dapat mengurangi waktu distribusi, memudahkan komunikasi ketika terjadi perubahan kebutuhan, dan membantu mempertahankan kesegaran bahan pangan. Literatur mengenai pengadaan pangan publik juga menjelaskan bahwa pembelian dari produsen lokal berpotensi memperkuat hubungan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, membuka akses pasar bagi usaha kecil, serta mengembangkan sistem pangan yang lebih tangguh (FAO et al., 2021). Meskipun demikian, status sebagai pemasok lokal tidak secara otomatis menjamin kualitas dan kontinuitas. Prioritas kepada UMKM lokal tetap perlu disertai persyaratan mutu, ketepatan waktu, legalitas usaha, dan kemampuan memenuhi jumlah yang disepakati.

Pengelolaan rantai pasok sebaiknya membedakan karakteristik setiap kelompok komoditas. Beras dan beberapa bahan kering memiliki umur simpan lebih panjang sehingga dapat dipesan secara periodik dan disiapkan dalam persediaan pengaman. Sebaliknya, sayuran, buah, tahu, tempe, ayam, dan telur memerlukan pengaturan frekuensi pengiriman, penanganan, serta waktu penerimaan yang lebih ketat. Pembagian pemasok berdasarkan jenis komoditas akan memudahkan SPPG menetapkan standar yang relevan dan menghindari penerapan satu mekanisme untuk seluruh bahan pangan. Pendekatan tersebut juga membantu UMKM fokus pada keunggulan produk yang benar-benar dikuasai, sehingga kemitraan berkembang berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata kedekatan personal.

Keterbatasan kapasitas produksi yang ditemukan dalam penelitian dapat diatasi melalui pengelompokan pemasok. UMKM yang belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri dapat membentuk klaster, koperasi, atau kelompok pemasok dengan pembagian volume dan wilayah produksi. Skema agregasi memungkinkan pesanan besar dipenuhi oleh beberapa usaha tanpa menghilangkan identitas masing-masing pemasok. Akan tetapi, agregasi membutuhkan koordinator yang bertanggung jawab terhadap konsolidasi jumlah, pemeriksaan mutu awal, pengiriman, dan penyelesaian masalah. Chaves et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi produsen skala kecil ke dalam program pangan sekolah sering terkendala oleh koordinasi, kapasitas, dan persyaratan administratif; karena itu, kelembagaan penghubung menjadi bagian penting dari solusi.

Penguatan pemasok lokal juga perlu dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, SPPG dapat menetapkan persentase kebutuhan yang realistis untuk dipenuhi UMKM lokal berdasarkan hasil pemetaan kapasitas. Porsi tersebut ditingkatkan setelah pemasok menunjukkan konsistensi mutu, ketepatan pengiriman, dan kemampuan menyesuaikan volume. Pendekatan bertahap lebih aman dibandingkan mengganti seluruh pemasok luar wilayah dalam waktu singkat, karena keberlangsungan pelayanan gizi tetap menjadi prioritas utama. Model ini memungkinkan program mempertahankan pemasok cadangan sambil membangun kemampuan UMKM lokal sampai memenuhi standar operasional yang dibutuhkan.

Keberhasilan penguatan rantai pasok dapat diukur melalui indikator yang sederhana dan konsisten, antara lain persentase belanja bahan pangan yang diserap UMKM lokal, jumlah pemasok lokal aktif, ketepatan pemenuhan volume, tingkat penolakan barang, waktu rata-rata pengiriman, dan frekuensi gangguan pasokan.

Indikator tersebut tidak dimaksudkan untuk menambah beban administratif, tetapi untuk memberikan dasar objektif bagi evaluasi. Ketika data menunjukkan peningkatan kinerja, SPPG memiliki alasan yang kuat untuk memperluas porsi pengadaan lokal. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan, pembinaan dapat diarahkan pada masalah yang spesifik sehingga keputusan tidak hanya didasarkan pada persepsi.

Penguatan Kapasitas UMKM sebagai Prasyarat Keberlanjutan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kendala UMKM tidak hanya terletak pada jumlah produksi, tetapi juga pada modal, kemampuan menjaga mutu, dan kontinuitas pasokan. Karena itu, penguatan kapasitas perlu mencakup dimensi produksi, manajemen, keuangan, sumber daya manusia, administrasi, dan logistik. UMKM yang mampu menghasilkan produk yang baik belum tentu siap menjadi pemasok program publik apabila belum memiliki pencatatan usaha, jadwal produksi, bukti transaksi, atau prosedur pengendalian mutu. Kemitraan kolaboratif perlu mengubah pembinaan dari kegiatan umum menjadi pendampingan berbasis kebutuhan pemasok dan tuntutan operasional SPPG.

Langkah pertama adalah menyusun profil kesiapan setiap UMKM. Pemetaan dapat mencakup jenis produk, kapasitas harian atau mingguan, sumber bahan baku, fasilitas penyimpanan, tenaga kerja, legalitas, modal kerja, sarana transportasi, serta riwayat ketepatan pengiriman. Berdasarkan profil tersebut, pemasok dapat dikelompokkan menjadi siap, siap dengan perbaikan terbatas, dan memerlukan pembinaan intensif. Klasifikasi ini membantu SPPG menentukan bentuk kontrak, volume awal, dan kebutuhan pengawasan. Selain itu, UMKM memperoleh gambaran yang jelas mengenai aspek apa yang harus diperbaiki agar dapat meningkatkan porsi pasokan.

Pendampingan sebaiknya terkait langsung dengan masalah yang ditemukan. UMKM sayuran dapat memerlukan pelatihan sortasi, pencucian, pengemasan, dan pengaturan waktu panen. Pemasok tahu dan tempe memerlukan perhatian pada higienitas produksi, keseragaman ukuran, dan daya tahan produk. Pemasok ayam dan telur membutuhkan prosedur penanganan, kebersihan, dan transportasi yang sesuai. Sementara itu, seluruh pemasok memerlukan pemahaman mengenai dokumen pesanan, pencatatan jumlah, bukti serah terima, dan penagihan. Pendampingan yang spesifik lebih mudah diterapkan dan dievaluasi dibandingkan pelatihan kewirausahaan yang terlalu luas.

Peningkatan kapasitas juga perlu didukung fasilitas bersama. Tidak semua UMKM harus memiliki gudang, alat angkut berpendingin, perangkat sortasi, atau ruang pengemasan secara mandiri. Pemerintah daerah, koperasi, perguruan tinggi, dan lembaga pendamping dapat memfasilitasi rumah kemasan, titik konsolidasi, penyimpanan sementara, serta layanan pengujian sederhana. Fasilitas kolektif menurunkan biaya investasi individual dan memungkinkan standar yang lebih seragam. Dalam kemitraan seperti ini, UMKM tetap menjadi produsen atau pemasok, sedangkan fasilitas bersama berfungsi sebagai penguat kualitas dan efisiensi distribusi.

Aspek manajerial harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi. Ketika permintaan meningkat, UMKM dapat menghadapi risiko menerima pesanan di luar kemampuan, menggunakan modal jangka pendek secara berlebihan, atau menurunkan mutu untuk mengejar jumlah. Oleh karena itu, pemasok perlu dibantu menghitung kapasitas normal, kapasitas maksimum, kebutuhan modal kerja, dan batas aman pertumbuhan. Temuan Barnabas et al. (2023) menunjukkan bahwa program makan berbasis pengadaan lokal dapat memperbaiki ketahanan pangan rumah tangga produsen kecil, tetapi integrasi mereka membutuhkan dukungan akses modal dan peningkatan kapasitas. Hal tersebut menguatkan pentingnya pembinaan yang menggabungkan aspek pasar dan kesiapan internal usaha.

Evaluasi kapasitas tidak seharusnya berakhir pada penilaian lulus atau tidak lulus. Model yang direkomendasikan dapat menggunakan mekanisme peningkatan kelas pemasok. UMKM memulai dengan volume terbatas, memperoleh umpan balik, melakukan perbaikan, kemudian mendapat tambahan volume apabila kinerjanya stabil. Mekanisme ini memberikan insentif yang nyata karena perbaikan usaha berhubungan langsung dengan peluang pasar. Pada saat yang sama, SPPG tetap dapat mengendalikan risiko dengan tidak memberikan volume besar sebelum pemasok membuktikan konsistensinya.

Tata Kelola Mutu, Keamanan Pangan, dan Ketepatan Distribusi

Program MBG melayani kelompok penerima manfaat dalam jumlah besar sehingga mutu dan keamanan pangan harus menjadi dasar kemitraan. Berdasarkan temuan penelitian, sebagian UMKM masih menghadapi kesulitan memenuhi standar yang ditetapkan SPPG. Kondisi ini menunjukkan perlunya menerjemahkan standar umum ke dalam spesifikasi operasional yang mudah dipahami pemasok. Spesifikasi tersebut dapat memuat jenis dan varietas produk, ukuran, tingkat kematangan, kebersihan, kondisi kemasan, suhu penerimaan untuk produk tertentu, batas toleransi kerusakan, jumlah, dan waktu pengiriman. Kejelasan spesifikasi mengurangi perbedaan penafsiran antara pemasok dan petugas penerima.

Prosedur penerimaan barang perlu dilaksanakan secara konsisten. Setiap pengiriman dapat diperiksa berdasarkan daftar periksa singkat yang sama untuk seluruh pemasok pada komoditas sejenis. Apabila barang tidak sesuai, petugas mencatat jenis ketidaksesuaian dan menentukan apakah barang dapat diterima dengan koreksi, diganti, atau ditolak. Dokumentasi tersebut penting agar UMKM mengetahui penyebab masalah dan dapat mencegah pengulangan. Sistem yang transparan juga melindungi pemasok dari penolakan yang bersifat subjektif karena keputusan didasarkan pada kriteria yang telah disepakati.

Ketertelusuran menjadi unsur penting ketika volume dan jumlah pemasok meningkat. SPPG perlu mengetahui asal produk, tanggal pengiriman, pemasok, dan pihak yang menerima. Untuk UMKM, sistem ketertelusuran tidak harus menggunakan teknologi yang rumit; kode pemasok, tanggal produksi atau panen, nota pengiriman, dan catatan penerimaan sudah dapat menjadi dasar. Jika terjadi masalah kualitas, produk dapat ditelusuri dan tindakan korektif dapat dilakukan secara cepat. Pencatatan ini juga membantu membedakan masalah yang berasal dari produksi, transportasi, penyimpanan, atau penanganan setelah barang diterima.

Ketepatan distribusi berkaitan langsung dengan mutu, terutama pada bahan mudah rusak. Jadwal pengiriman perlu disesuaikan dengan kapasitas penyimpanan SPPG dan waktu pengolahan. Pengiriman terlalu awal dapat menambah kebutuhan penyimpanan, sedangkan keterlambatan mengganggu proses produksi makanan. Karena itu, kemitraan perlu menetapkan jendela waktu pengiriman dan saluran komunikasi ketika terjadi hambatan. Untuk komoditas tertentu, pengiriman dapat dibagi menjadi beberapa tahap agar kesegaran terjaga dan beban penerimaan tidak menumpuk pada waktu yang sama.

Pengelolaan mutu sebaiknya menggunakan pendekatan perbaikan bertahap, bukan hanya sanksi. Ketidaksesuaian pertama yang masih dapat diperbaiki dapat ditindaklanjuti dengan penjelasan dan batas waktu perbaikan. Pelanggaran berulang memerlukan rencana tindakan korektif, pengurangan volume, atau penghentian sementara. Sanksi yang proporsional menjaga disiplin tanpa langsung menutup kesempatan UMKM untuk berkembang. Namun, ketidaksesuaian yang berisiko terhadap keamanan pangan tetap harus ditangani secara tegas karena perlindungan penerima manfaat tidak dapat dikompromikan.

Secara kelembagaan, tata kelola mutu perlu diselaraskan dengan pedoman teknis Program MBG. Petunjuk teknis Badan Gizi Nasional menempatkan tata kelola, distribusi, pemantauan, dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelaksanaan program (Badan Gizi Nasional, 2025). Oleh sebab itu, persyaratan kepada pemasok perlu dipahami sebagai bagian dari sistem pelayanan, bukan hambatan administratif. SPPG dapat membantu UMKM memenuhi persyaratan dengan menyediakan contoh dokumen, jadwal sosialisasi, dan pendampingan pada masa awal kemitraan.

Pembiayaan, Mekanisme Pembayaran, dan Stabilitas Harga

Keterbatasan modal usaha merupakan salah satu penghambat yang ditemukan dalam penelitian. Permintaan rutin memang memberikan kepastian pasar, tetapi juga meningkatkan kebutuhan modal kerja karena pemasok harus membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, menyiapkan kemasan, dan mengirim barang sebelum menerima pembayaran. Semakin besar volume pesanan, semakin besar pula dana yang harus berputar. Dengan demikian, peningkatan porsi pengadaan dari UMKM perlu diikuti desain pembayaran yang tidak menimbulkan tekanan likuiditas berlebihan.

Kepastian waktu pembayaran harus menjadi bagian dari kesepakatan kemitraan. Dokumen pesanan, bukti serah terima, waktu pemeriksaan, proses penagihan, dan tanggal pembayaran perlu dijelaskan sejak awal. Apabila terdapat kekurangan dokumen, pemasok harus segera diberi informasi agar perbaikan tidak tertunda. Pembayaran yang dapat diprediksi memungkinkan UMKM menyusun arus kas dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal. Sebaliknya, ketidakpastian pembayaran dapat membuat pemasok mengurangi volume, menurunkan kualitas, atau menghentikan kerja sama meskipun permintaan program tinggi.

Fluktuasi harga bahan baku memerlukan mekanisme penyesuaian yang adil. Harga tidak harus berubah setiap hari, tetapi perlu dievaluasi pada periode yang disepakati atau ketika terjadi perubahan pasar yang signifikan. Formula dapat menggunakan data harga pasar lokal, harga acuan pemerintah, atau survei bersama. Mekanisme tersebut mencegah seluruh risiko harga dibebankan kepada UMKM dan sekaligus melindungi SPPG dari kenaikan yang tidak dapat dijelaskan. Transparansi komponen biaya juga membantu kedua pihak memahami batas kewajaran harga tanpa membuka seluruh informasi internal usaha.

Akses pembiayaan dapat diperkuat melalui kerja sama dengan bank, koperasi, lembaga keuangan mikro, atau program pemerintah daerah. Riwayat pesanan dan pembayaran dari SPPG dapat menjadi bukti adanya pasar yang stabil bagi UMKM. Namun, pembiayaan harus disesuaikan dengan siklus usaha dan kemampuan membayar, bukan sekadar memperbesar utang. Skema pembiayaan modal kerja jangka pendek, pembelian bahan baku bersama, atau pembayaran sebagian setelah verifikasi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendampingan pencatatan keuangan diperlukan agar UMKM mampu memisahkan dana usaha, menghitung margin, dan menilai kebutuhan pembiayaan secara rasional.

Pengalaman program pengadaan pangan lokal di berbagai negara menunjukkan bahwa akses kredit, infrastruktur, kapasitas rantai nilai, dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan sering menjadi hambatan partisipasi produsen kecil (Sustainable Financing Initiative, 2025). Temuan tersebut sesuai dengan kondisi SPPG Sukamanah, terutama terkait modal dan kontinuitas pasokan. Oleh sebab itu, kemitraan kolaboratif perlu menghubungkan kepastian pasar dengan dukungan pembiayaan dan peningkatan kapasitas. Tanpa hubungan tersebut, kontrak berulang dapat menghasilkan tekanan operasional, bukan pertumbuhan yang sehat.

Evaluasi harga dan pembayaran perlu menjadi agenda rutin pertemuan kemitraan. SPPG dapat memantau ketepatan pembayaran, jumlah koreksi tagihan, perubahan harga komoditas, dan keluhan pemasok. UMKM dapat menyampaikan kondisi biaya produksi serta hambatan yang memengaruhi pengiriman. Forum ini bukan tempat negosiasi tanpa batas, tetapi sarana mencegah masalah kecil berkembang menjadi gangguan pasokan. Keputusan yang dihasilkan perlu dicatat agar dapat dijadikan acuan pada periode berikutnya.

Manajemen Risiko dan Kontinuitas Pasokan

Kontinuitas pasokan merupakan persoalan penting karena Program MBG berlangsung secara rutin. Penelitian mengidentifikasi cuaca, kapasitas produksi, modal, dan fluktuasi harga sebagai sumber gangguan. Risiko tersebut perlu dipetakan berdasarkan komoditas dan periode. Sayuran dan buah lebih rentan terhadap musim dan cuaca, produk olahan harian bergantung pada kelancaran produksi, sedangkan ayam dan telur dapat dipengaruhi harga pakan serta kondisi kesehatan ternak. Pemetaan membantu SPPG memilih tindakan pencegahan yang sesuai, bukan menggunakan satu strategi untuk seluruh bahan pangan.

Strategi pertama adalah multi-sourcing atau penggunaan lebih dari satu pemasok untuk komoditas kritis. Pembagian volume mengurangi ketergantungan kepada satu usaha dan memberi ruang bagi lebih banyak UMKM lokal. Namun, jumlah pemasok harus tetap terkendali agar koordinasi dan pemeriksaan mutu tidak menjadi terlalu rumit. SPPG dapat menetapkan pemasok utama dan pemasok cadangan, dengan kriteria serta volume yang jelas. Pemasok cadangan perlu tetap dilibatkan secara terbatas agar siap ketika dibutuhkan, bukan baru dicari setelah gangguan terjadi.

Strategi kedua adalah pengaturan persediaan dan substitusi menu. Bahan yang tahan simpan dapat memiliki stok pengaman sesuai kapasitas gudang dan pola penggunaan. Untuk bahan segar, SPPG dapat menyiapkan daftar substitusi yang setara dari sisi fungsi menu dan tersedia secara lokal, dengan tetap mengikuti ketentuan gizi. Fleksibilitas ini penting ketika produksi menurun akibat cuaca atau harga melonjak. Keputusan substitusi harus terencana dan terdokumentasi agar tidak menurunkan mutu pelayanan maupun menimbulkan kebingungan kepada pemasok.

Strategi ketiga adalah protokol penanganan insiden. UMKM wajib menyampaikan informasi segera ketika tidak mampu memenuhi pesanan, sedangkan SPPG memiliki alur untuk mengaktifkan pemasok cadangan, menyesuaikan jumlah, atau mencari alternatif. Setelah insiden selesai, kedua pihak melakukan evaluasi penyebab dan tindakan pencegahan. Budaya pelaporan dini perlu dihargai karena memberikan waktu untuk menyelesaikan masalah. Menyembunyikan gangguan sampai batas pengiriman justru meningkatkan risiko terhadap operasional SPPG.

Kajian Liguori et al. (2024) menunjukkan bahwa program makan sekolah yang dibiayai dan diadakan secara publik menghadapi tantangan pada tahap persiapan, distribusi, pendanaan, pemantauan, dan koordinasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan pangan, tetapi oleh keterhubungan seluruh proses. Bagi SPPG Sukamanah, manajemen risiko perlu mencakup pemasok, transportasi, penerimaan, penyimpanan, dan komunikasi, sehingga gangguan pada satu titik dapat segera direspons oleh bagian lain.

Kontinuitas juga perlu dilihat dari sisi keberlanjutan UMKM. Pemasok yang terus menerima harga terlalu rendah, menanggung keterlambatan pembayaran, atau bekerja di luar kapasitas akan sulit bertahan. Karena itu, ukuran keberhasilan tidak hanya ketiadaan kekurangan pasokan, tetapi juga kesehatan hubungan usaha. Tingkat pergantian pemasok, keluhan, keterlambatan pembayaran, dan margin yang wajar perlu diperhatikan. Kemitraan yang stabil tercipta ketika risiko dibagi secara proporsional dan kedua pihak memiliki insentif untuk menjaga hubungan jangka panjang.

Operasionalisasi Model Kemitraan Kolaboratif

Berdasarkan keseluruhan temuan, model kemitraan kolaboratif dapat dioperasionalkan melalui lima pilar, yaitu tata kelola yang jelas, pengembangan pemasok, integrasi proses operasional, pembagian risiko yang adil, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tata kelola menjelaskan peran dan kewenangan; pengembangan

pemasok meningkatkan kesiapan UMKM; integrasi operasional menyelaraskan pesanan, produksi, distribusi, dan penerimaan; pembagian risiko mengatur harga, pembayaran, dan gangguan pasokan; sedangkan evaluasi memastikan hubungan kemitraan berkembang berdasarkan bukti. Kelima pilar perlu berjalan bersama karena kelemahan pada satu pilar dapat mengurangi efektivitas pilar lainnya.

Tahap pertama adalah pemetaan kebutuhan dan pemasok. SPPG menyusun proyeksi jenis, volume, frekuensi, standar, dan periode kebutuhan bahan pangan. Pada waktu yang sama, dilakukan pendataan UMKM lokal beserta kapasitas dan kendalanya. Hasil pemetaan digunakan untuk menentukan komoditas yang dapat segera dipasok secara lokal dan komoditas yang memerlukan masa pengembangan. Tahap ini juga menjadi dasar untuk menghindari janji volume yang tidak realistis kepada UMKM atau target penggunaan produk lokal yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan.

Tahap kedua adalah seleksi dan orientasi pemasok. Seleksi sebaiknya terbuka, menggunakan kriteria yang diketahui, dan memberikan kesempatan perbaikan bagi UMKM yang belum memenuhi seluruh persyaratan. Pemasok terpilih mengikuti orientasi mengenai standar mutu, jadwal, dokumen, mekanisme komunikasi, pembayaran, dan penanganan ketidaksesuaian. Orientasi memastikan bahwa kesepakatan tidak hanya dipahami oleh pemilik usaha, tetapi juga oleh pekerja yang terlibat dalam produksi dan pengiriman. Kesalahan operasional sering terjadi ketika informasi berhenti pada satu orang dan tidak diteruskan kepada pelaksana.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan melalui kontrak atau kesepakatan tertulis yang proporsional. Dokumen perlu memuat komoditas, spesifikasi, perkiraan volume, cara pemesanan, waktu pengiriman, pemeriksaan, harga atau metode penetapan harga, jadwal pembayaran, penggantian barang, keadaan darurat, evaluasi, dan penghentian kerja sama. Kesepakatan tertulis tidak harus rumit, tetapi harus cukup jelas untuk menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan. Hubungan yang dilandasi kepercayaan akan lebih kuat apabila hak dan kewajiban tetap terdokumentasi.

Tahap keempat adalah pemantauan dan pendampingan. Selama masa awal, SPPG memberikan umpan balik lebih sering dan UMKM diberi ruang melakukan penyesuaian. Pemantauan menggunakan indikator ketepatan volume, mutu, waktu, respons komunikasi, dan kelengkapan dokumen. Apabila masalah terjadi, tindakan diarahkan pada akar penyebab. Kekurangan kapasitas memerlukan pembatasan volume atau agregasi pemasok, masalah mutu memerlukan perbaikan proses, sedangkan masalah pembayaran memerlukan penyederhanaan administrasi. Pendekatan ini menjaga evaluasi tetap adil dan berorientasi perbaikan.

Tahap kelima adalah pengembangan dan perluasan. UMKM dengan kinerja baik dapat memperoleh peningkatan volume, kontrak yang lebih stabil, atau kesempatan memasok komoditas tambahan. UMKM yang belum siap tetap dapat masuk dalam program pembinaan atau menjadi pemasok pendukung dalam klaster. Perluasan tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah pemasok, tetapi dari bertambahnya porsi kebutuhan yang dipenuhi secara konsisten oleh usaha lokal. Dengan cara ini, partisipasi meningkat tanpa menurunkan standar pelayanan.

Pembagian peran dalam model kolaboratif harus melibatkan lebih dari dua pihak. SPPG bertanggung jawab pada perencanaan kebutuhan, spesifikasi, penerimaan, dan evaluasi. UMKM bertanggung jawab pada produksi, mutu, ketepatan jumlah, dan komunikasi gangguan. Pemerintah daerah dapat mendukung legalitas, pembinaan, fasilitas, akses pembiayaan, dan koordinasi lintas dinas. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendampingan manajemen, pengembangan prosedur, dan evaluasi. Lembaga keuangan mendukung modal kerja yang sesuai. Keterlibatan multipihak ini memperkuat ekosistem tanpa mengaburkan tanggung jawab utama setiap aktor.

Secara normatif, model tersebut sejalan dengan arah tata kelola Program MBG yang mencakup penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, pendanaan, dan pengadaan barang atau jasa (Pemerintah Republik Indonesia, 2025). Keberadaan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan pemenuhan gizi nasional juga memberikan dasar kelembagaan bagi koordinasi program (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Pada tingkat SPPG, ketentuan tersebut perlu diterjemahkan menjadi prosedur kemitraan yang sederhana, terukur, dan dapat diterapkan oleh UMKM.

Model kolaboratif tidak dimaksudkan sebagai pola yang kaku. Kondisi komoditas, jumlah penerima manfaat, kapasitas penyimpanan, jarak pemasok, dan struktur UMKM di setiap wilayah dapat berbeda. Oleh karena itu, elemen inti model perlu dipertahankan, sedangkan bentuk operasional dapat disesuaikan. Fleksibilitas ini penting agar model tetap relevan dan tidak menambah tahapan yang tidak diperlukan. Prinsip utamanya adalah memastikan partisipasi lokal meningkat bersamaan dengan mutu, kontinuitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

Implikasi Ekonomi Lokal, Kebijakan, dan Kontribusi Penelitian

Keterlibatan UMKM dalam rantai pasok Program MBG memiliki potensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dibandingkan transaksi langsung antara SPPG dan pemasok. Permintaan terhadap beras, sayuran,

buah, protein hewani, serta produk olahan dapat meningkatkan kegiatan pada tingkat produsen, pedagang bahan baku, tenaga kerja, transportasi, dan jasa pengemasan. Dampak tersebut akan lebih besar apabila sumber produksi dan pengeluaran usaha tetap berada di wilayah lokal. Karena itu, pengukuran manfaat program dapat dikembangkan tidak hanya pada nilai pembelian, tetapi juga pada jumlah tenaga kerja, peningkatan kapasitas usaha, dan terbentuknya hubungan pasar baru.

Namun, dampak lokal tidak terjadi secara otomatis. UMKM dapat memperoleh kontrak tetapi membeli sebagian besar bahan dari luar wilayah, atau peningkatan omzet tidak diikuti peningkatan laba karena biaya dan risiko terlalu tinggi. Evaluasi perlu membedakan nilai transaksi, nilai tambah lokal, dan keberlanjutan usaha. Pendekatan ini mencegah kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa bertambahnya jumlah pemasok selalu berarti pemberdayaan. Pemberdayaan terjadi ketika UMKM memiliki kapasitas yang meningkat, arus kas yang lebih sehat, akses pasar yang lebih luas, dan posisi tawar yang lebih baik.

Literatur internasional mengenai home-grown school feeding menekankan bahwa pengadaan lokal yang dirancang dengan baik dapat mendukung mata pencaharian produsen kecil, memperkuat ekonomi lokal, dan menghubungkan tujuan gizi dengan pembangunan sistem pangan (World Food Programme, 2022; Sustainable Financing Initiative, 2025). Temuan penelitian di SPPG Sukamanah memberikan gambaran pada tingkat pelaksanaan mengenai bagaimana potensi tersebut berhadapan dengan kapasitas, mutu, modal, harga, cuaca, dan kontinuitas. Dengan demikian, keberhasilan memerlukan kebijakan yang menghubungkan target partisipasi lokal dengan investasi pada kesiapan pemasok.

Implikasi kebijakan utama adalah perlunya mekanisme koordinasi antara pengelola program, dinas yang membina UMKM, dinas pangan atau pertanian, lembaga keuangan, dan pemerintah desa atau kecamatan. SPPG tidak seharusnya menanggung seluruh tugas pengembangan usaha karena fokus utamanya adalah pelayanan makanan bergizi. Data kebutuhan dan kinerja pemasok dari SPPG dapat menjadi dasar bagi instansi lain untuk merancang pelatihan, fasilitas, legalisasi, atau pembiayaan. Koordinasi seperti ini mengurangi duplikasi program dan membuat dukungan pemerintah lebih relevan dengan permintaan pasar yang nyata.

Dari sisi program, manfaat gizi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara saling mendukung. Kajian Cohen et al. (2021) menunjukkan bahwa program makan universal berkaitan dengan peningkatan partisipasi makan sekolah dan berpotensi memberikan manfaat pada kualitas diet, kehadiran, serta ketahanan pangan, meskipun hasil antarindikator tidak selalu seragam. Artinya, kualitas pelaksanaan tetap menentukan dampak. Penggunaan UMKM lokal harus mendukung ketersediaan makanan yang aman, bermutu, dan tepat waktu; tujuan pemberdayaan tidak boleh mengurangi standar gizi dan pelayanan kepada penerima manfaat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan model kemitraan pada tingkat SPPG dengan menghubungkan kondisi keterlibatan UMKM, pola kerja sama, faktor pendukung, faktor penghambat, dan kebutuhan penguatan partisipasi lokal. Penggunaan wawancara, observasi, dokumentasi, serta analisis NVivo membantu memperlihatkan hubungan antartema. Model yang dihasilkan memperluas kemitraan operasional menjadi kemitraan kolaboratif yang mencakup pengembangan pemasok dan tata kelola risiko. Hal ini memberikan dasar praktis bagi SPPG untuk memperbaiki hubungan pemasok tanpa meninggalkan konteks lokal.

Penelitian tetap memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu SPPG dengan jumlah informan yang terbatas dan pendekatan kualitatif. Temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik kepada seluruh SPPG. Selain itu, penelitian belum mengukur perubahan omzet, laba, tenaga kerja, nilai pembelian lokal, ketepatan pengiriman, atau tingkat penolakan secara longitudinal. Penelitian lanjutan dapat menguji model pada beberapa wilayah, membandingkan jenis tata kelola, serta menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Pengujian tersebut penting untuk mengetahui komponen model yang paling efektif pada kondisi kapasitas UMKM dan rantai pasok yang berbeda.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan UMKM lokal memerlukan keseimbangan antara inklusi dan keandalan. Inklusi membuka kesempatan bagi pelaku usaha daerah, sedangkan keandalan menjaga mutu dan kontinuitas Program MBG. Model kemitraan kolaboratif menjembatani kedua tujuan melalui pemetaan, seleksi yang transparan, peningkatan kapasitas, standarisasi, pembayaran yang pasti, pengelolaan risiko, pemanfaatan data, dan evaluasi. Apabila dilaksanakan secara bertahap dan didukung multipihak, model tersebut dapat memperkuat SPPG sekaligus membangun UMKM pangan yang lebih siap memasuki pasar kelembagaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan UMKM lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya telah memberikan kontribusi positif terhadap penyediaan bahan pangan sekaligus membuka peluang peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Model kemitraan yang diterapkan merupakan kemitraan operasional yang didasarkan pada prinsip saling membutuhkan dan saling

menguntungkan melalui pembagian peran yang jelas antara SPPG dan UMKM. Pelaksanaan kemitraan didukung oleh koordinasi yang baik, kepastian pasar, permintaan yang berkelanjutan, serta komunikasi yang efektif. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan kapasitas produksi, fluktuasi harga bahan baku, keterbatasan modal usaha, kondisi cuaca, dan kontinuitas pasokan yang memengaruhi optimalisasi keterlibatan UMKM lokal. Oleh karena itu, model kemitraan kolaboratif yang menekankan kerja sama berkelanjutan, peningkatan kapasitas UMKM, komunikasi yang intensif, serta dukungan pemerintah menjadi alternatif yang tepat untuk memperkuat keterlibatan UMKM lokal dalam Program MBG. Penerapan model tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Referensi

1. Ambarwati, O. C., Kurniawati, H., Sofianto, A., Risandewi, T., Pamungkas, D., Sumarni, S., Nugraha, T., et al. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah: Strategies for Utilizing Local Food Potential to Support the Free Nutritional Meal (MBG) Program in Central Java*, 2(1).
2. Basit, M., & Ramadani, H. (2025). Analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis terhadap perkembangan ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 49–54. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.105>
3. Edit, F., Astuti, N. W. W., & Firmani, P. S. (2026). Peran kemitraan strategis dalam mendorong kemandirian UMKM melalui kolaborasi dengan tokoh ritel. 7(1), 79–88.
4. Fitri, E. D., & Wahyudi, A. (2025). Peran kemitraan bisnis dalam meningkatkan daya saing UMKM di Blitar. *JIAKU*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v5i1.7607>
5. Rahmawati, N. F., & Fatticia, R. (2025). Analisis strategi kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, 4, 422–431. <https://usahid.ac.id/conference/index.php/snpk/article/view/358>
6. Salsabila, W., Baga, L. M., & Feryanto. (2025). Keputusan untuk bermitra dan dampaknya terhadap kinerja usaha mikro kecil (UMK) di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 13(1), 185–197. <https://doi.org/10.29244/jai.2025.13.1.185-197>
7. Septa Rinawati, Herrukmi, & Sadewo, F. X. S. (2019). Pengembangan model kemitraan UMKM dengan usaha skala sedang dan besar di Jawa Timur melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Matra Pembaruan*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.21787/mp.3.2.2019.67-77>
8. Tyas, W. P., Sianturi, O. O., & H., J. K. P. (2020). Analisis kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis rumah (*Home-Based Enterprises/HBE*) di Kota Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, dan Surabaya. *Jurnal Pengembangan Kota*, 8(1), 78–89. <https://doi.org/10.14710/jpk.8.1.78-89>
9. Widyani, W. M. (2013). Pentingnya pola kemitraan dalam rangka meningkatkan peran dan kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah di Jawa Timur periode 2006–2011. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(2), 1–12
10. Badan Gizi Nasional. (2025). Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Badan Gizi Nasional.
11. Barnabas, B., Agyemang, S. A., Zhllima, E., & Bavorova, M. (2023). Impact of homegrown school feeding program on smallholders' farmer household food security in Northeastern Nigeria. *Foods*, 12(12), 2408. <https://doi.org/10.3390/foods12122408>
12. Chaves, V. M., Rocha, C., Gomes, S. M., Jacob, M. C. M., & da Costa, J. B. A. (2023). Integrating family farming into school feeding: A systematic review of challenges and potential solutions. *Sustainability*, 15(4), 2863. <https://doi.org/10.3390/su15042863>
13. Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: A systematic review. *Nutrients*, 13(3), 911. <https://doi.org/10.3390/nu13030911>
14. FAO, Alliance of Bioversity International and CIAT, & Editora da UFRGS. (2021). Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets: Volume 1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cb7960en>
15. Liguori, J., Osei-Kwasi, H. A., Savy, M., Nanema, S., Laar, A., & Holdsworth, M. (2024). How do publicly procured school meals programmes in sub-Saharan Africa improve nutritional outcomes for children and adolescents: A mixed-methods systematic review. *Public Health Nutrition*, 27(1), e213. <https://doi.org/10.1017/S1368980024001939>
16. Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173.
17. Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183.
18. Sustainable Financing Initiative for School Health and Nutrition. (2025). Home-grown school feeding: Case studies on procurement and financing. Education Development Center and School Meals Coalition.
19. World Food Programme. (2022). State of school feeding worldwide 2022. World Food Programme.